

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesetaraan gender dewasa ini mengambil peran penting dalam berbagai aspek di suatu Negara, terutama dalam ekonomi dan pembangunan. Pada dinamika Hubungan Internasional, kesetaraan gender bukanlah isu utama yang kerap kali menjadi pokok pembahasan, namun tetap menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pembangunan sebuah Negara. Banyak Negara-negara maju yang telah mengusung adanya kebijakan luar negeri yang bersifat feminis, untuk menyongsong kesetaraan gender di politik yang sejak dahulu berpusat pada laki-laki (*men-centered*) dan isu *high politics* saja.

Membicarakan kesetaraan gender pun tak lepas dari adanya keterwakilan perempuan, yang mengartikan bahwa adanya partisipasi aktif dari perempuan dalam politik dan pemerintahan dalam upaya untuk mengikutsertakan aspek kesetaraan gender dalam kebijakan yang dirumuskan oleh Negara, salah satunya kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada keterwakilan perempuan yang menjadi salah satu kunci dalam implementasi kesetaraan gender dalam proses pembuatan kebijakan. Posisi perempuan dan keterwakilan perempuan dapat menjadi titik komparasi, dimana posisinya yang krusial dalam pemerintahan memberikan perempuan ruang untuk dapat memperjuangkan haknya dalam proses pembuatan kebijakan agar dalam aksinya dapat berlaku setara sesuai dengan tujuan kesetaraan gender.

Meskipun data dari *Global Gender Gap Report* tahun 2018 menunjukkan bahwa Filipina masih menjadi salah satu Negara dengan kesetaraan gender terbaik di dunia sementara Indonesia menjadi salah satu Negara dengan kesetaraan gender yang tidak cukup baik, namun melihat dengan kebijakan-

kebijakan yang ada dapat disimpulkan bahwa kedua Negara sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Indonesia memiliki dasar hukum dan kebijakan yang kuat dalam mengimplementasikan kesetaraan gender di negaranya, terlebih ketika membicarakan mengenai keterwakilan perempuan di pemerintahan, namun pada kenyataannya, keterwakilan perempuan masih memiliki persentase yang cukup rendah, bahkan untuk pekerjaan di sektor lain pun aktor perempuan masih berada dalam taraf yang cukup rendah. Sejarahnya dalam memiliki perempuan memang memberikan efek yang cukup besar dalam perubahan kebijakan di Indonesia, salah satunya adalah kuota bagi perempuan sebanyak 30% dari jumlah kursi pemerintahan. Hal ini sendiri terjadi atas usaha yang dilakukan oleh banyak organisasi non-pemerintah yang menggerakkan pemerintahan Megawati pada saat itu untuk dapat meratifikasikan kebijakan, yang memberikan kesempatan pula bagi perempuan Indonesia untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Sementara itu, Filipina lebih digerakkan oleh gerakan perempuannya yang memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan secara general. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan pun mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu, namun selalu bertambah secara stabil, yang memberikan ruang lebih lega bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan, salah satunya adalah kebijakan luar negeri, dimana Filipina memberikan perhatian khusus pada pekerja imigran yang ambil andil cukup besar dalam efektivitas ekonomi Negara. Presiden perempuan sebagai representasi dari keterwakilan perempuan pun memiliki andil cukup besar dalam pemutusan kebijakan luar negeri yang kemudian memberikan Filipina kesempatan untuk menguatkan posisinya dalam hubungan internasional. Selain itu, keterwakilan perempuan yang aktif didukung oleh gerakan perempuan dan partai perempuan menjadikan aksi kebijakan Filipina, baik domestik maupun global, bergerak

secara aktif dalam pengembangan Negara yang sepadan dengan kesetaraan gender.

Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua Negara tersebut dalam caranya mengimplementasikan kesetaraan gender di kebijakan luar negeri dengan keterwakilan perempuan sebagai salah satu aspek utama seperti menjawab pertanyaan mengenai alasan mengapa angka persentase kesetaraan gender di kedua Negara cukup jauh perbedaannya. Secara lebih dalam, hal ini dapat terjadi bukan hanya karena keterwakilan perempuan yang berkontribusi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan hingga kebijakan ini dirumuskan dan diratifikasi sesuai pandangan kesetaraan gender, namun dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan mengambil porsi yang cukup besar dalam alasan mengapa terjadi kesuksesan dalam pengimplementasi kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan di Negara, baik itu kebijakan dalam negeri, maupun kebijakan luar negeri.

Perbandingan dalam angka keterwakilan perempuan yang cukup signifikan diantara Indonesia dan Filipina menjadi salah satu titik utama dalam adanya perbandingan kesetaraan gender antara kedua Negara tersebut. Dalam aspek kebijakan luar negeri, baik Indonesia yang secara aktif bekerja sama dengan organisasi internasional dalam upaya peningkatan efektivitas kesetaraan gender untuk menunjang pembangunan dan ekonomi, maupun Filipina yang secara aktif bekerja dalam dorongan gerakan perempuannya yang kuat untuk tetap memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan di dalam maupun luar negeri, keduanya memiliki porsi dan pandangan masing-masing yang dianggap terbaik bagi mereka untuk mewujudkan pembangunan yang setara.

Kedua Negara tersebut pun masih dengan giat mengupayakan untuk dapat memenuhi segala aspek-aspek *SDGs* atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam upayanya mengembangkan Negara secara berkesinambungan tanpa meninggalkan satu aspek pun. Baik dalam

keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender maupun aspek lainnya, Indonesia dan Filipina secara aktif merumuskan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat menjadi salah satu penopang Negara untuk dapat berkembang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

